

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGAWASAN  
KEUANGAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERHADAP NILAI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang)**

ARTIKEL ILMIAH

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh*

*Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu*



*Oleh:*

**FADHILLA HUSNA**

**2008/05240**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2013**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

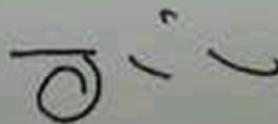
**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGAWASAN  
KEUANGAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERHADAP NILAI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
(Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang)**

**FADHILLA HUSNA  
05240/2008**

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode  
Juni 2013 dan telah diperiksa/ disetujui oleh kedua pembimbing

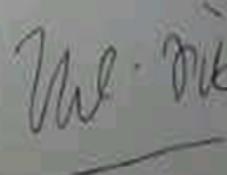
Padang, Mei 2013

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Svofyan, SE, M. Si, Ak  
NIP : 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Nelvirita, SE, M. Si, Ak  
NIP : 19740706 199903 2 002

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGAWASAN  
KEUANGAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERHADAP NILAI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH**

**(Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang)**

**Fadhilla Husna**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email : [fadhilla.husna040391@yahoo.com](mailto:fadhilla.husna040391@yahoo.com)

***Absctract***

*Based on the results of the Local Government Financial Reports Fiscal Year 2009 to 2011, the capitalcity Padang Panjang received opinions Qualified. The results of this examination caused by Government Financial Statements did not complete the value of characteristics information from the financial statements it self. The value of government financial report information is influenced by several factors: Human resource quality, the control of regional finance, and the system of intern control. The writer wanted to know the effect those factorsto the value of government financial report information. To test this hypothesis, the writer used primary data. The techniques analysis of data used multiple reggression analysis with human resource quality, the control of regional finance and the system of intern independent variable and the value of government financial report information as an dependent variable. After the data was analyzed, it found that one of the above factors had no significantly give positive influence to the value of government financial report information. It is recommended to the local government to able to improve human resource quality and do a review about the system of intern controland the control of regional financeto make financial report so it has information value.*

**Key words:** *information value, Human resource quality, the control of regional finance, and the system of intern control.*

## 1. PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002).

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip yang disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Governmental Accounting Standard Board* (1999) dalam *Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai (Suwardjono, 2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan

perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Menurut Wahyono (2004:12) informasi harus andal sebagai salah satu indikator berkualitasnya suatu informasi. Keterandalan disini menyangkut sumber daya manusia yang menghasilkannya. Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (andal).

Penelitian mengenai sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Dinata (2004) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan Kota Palembang belum sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (Dinata, 2004). Kualitas sumber daya manusia yang masih minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang bermutu. Maka oleh sebab itu perlu

adanya pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah, agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang bermutu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlakukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Dari hasil penelitian Galuh (2012) ditemukan masih lemahnya pengawasan dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007). Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum

manajemen dalam merancang sistem pengendalian intern yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliable (Arens, 2008:370).

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Ria Setiawan (dalam Indriasari, *et al.*2008) sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK, salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK menghimbau agar temuan tentang Sistem Pengendalian Intern dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi perhatian bersama, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektifitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan Negara demi kepentingan masyarakat dan daerah.

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai standar akuntansi pemerintah dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2010 Kota Padang Panjang, BPK RI perwakilan Sumatera Barat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di bidang aset, itu berarti tidak ada peningkatan dari tahun

sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2011 opini audit LKPD kota Padang Panjang tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Dalam rangka peningkatan opini pada Pemerintah daerah, seharusnya masing-masing Pemda memperkaya SDM yang telah mengerti tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga tidak terjadi pelaksanaannya bagusedangkan penyajiannya kurang bermutu” ujar L. Swandi Sitanggang. Keterangan tersebut diberikan masih terhadap asset yang juga terjadi semenjak tahun 2009. BPK berharap setiap Pemerintah Daerah dapat menjadikan LHP yang telah diserahkan BPK sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dimasa yang akandatang (<http://padang.bpk.go.id/>).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria nilai informasi pelaporan keuangan yaitunya keterandalan.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, dengan berfokus pada satu nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah saja yaitu keandalan.

## **2. TELAHAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara (Suwardjono, 2005). Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan Keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau

dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Dalam Standar Akuntansi pemerintah (SAP) (2005:56) tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

### **Nilai Informasi**

Menurut Suwardjono (2005) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Menurut Wahyono (2004) dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau berlaku.

Menurut Suwardjono (2005), suatu informasi dikatakan mempunyai nilai bila dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya. Kebermanfaatan ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain :

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*).
- b) Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*).
- c) Tepat Waktu.
- d) Lengkap.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a) Penyajian Jujur.
- b) Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)
- c) Netralitas

Sebagai aspek pendukung keberpautan, Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Wahyono (2004:12) kriteria lain nilai informasi adalah akurat (*accurate*) dan andal. Untuk mencapai informasi akurat diperlukan komponen pengendalian / kontrol. Komponen kontrol atau pengendalian akan menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak. Menurut Arens dalam Amir (1996:258), manajemen mempunyai kewajiban dan kepentingan untuk melaksanakan pengendalian intern dalam hal menyiapkan laporan keuangan.

Menurut Suwardjono (2005 :167) informasi dikatakan mempunyai nilai apabila informasi tersebut:

- 1) Menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, atau masa datang.
- 2) Menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian.
- 3) Mengubah keputusan atau perilaku para pemakai.

### **Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat

dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005).

Ukuran kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman (Griffin, 2004) yaitu:

1) Pendidikan

Pendidikan dapat dibagi menjadi: (a) pendidikan formal, (b) pendidikan informal, (c) pendidikan nonformal.

2) Pelatihan

Menurut Kendall (2003) dalam Wahyuni (2011), ada beberapa indikator pelatihan, yaitu: a) menetapkan sasaran yang jelas dan terukur, b) menggunakan metode pelatihan yang tepat, c) mempersiapkan materi pelatihan yang mudah dipahami, d) pelatihan memberikan keuntungan, e) pelatihan diberikan oleh tenaga ahli, f) materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pemakai, g) materi pelatihan disiapkan dengan baik.

3)

pengalaman

Menurut Dessler (2003, 135-136), pengalaman dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi dan prestasi pekerjaan.

### **Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan menurut peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang pedoman dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pasal 1 (satu) menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar

pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Yosa (2010) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).

Jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan objek, sifat, ruang lingkup, dan metode pengawasannya. (Baswir, 2000)

1) Pengawasan berdasarkan objek

- a) Pengawasan terhadap penerimaan Negara
- b) Pengawasan terhadap pengeluaran Negara

2) Pengawasan berdasarkan sifatnya

- a) Pengawasan preventif
- b) Pengawasan detektif

3) Pengawasan menurut ruang lingkungannya

- a) Pengawasan internal
  - b) Pengawasan eksternal
- 4) Pengawasan menurut metode pengawasannya
- a) Pengawasan melekat
  - b) Pengawasan fungsional

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut:

- a) Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
- b) Pengawasan Ekstern, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
- c) Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.
- d) Pengawasan Represif, adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

Pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan daerah ialah:

1. Pengaturan dan penetapan
2. Perencanaan dan penganggaran
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
4. Pertanggungjawaban keuangan daerah
5. Pendapatan dan belanja daerah

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Arens (2008:375) internal control yang dikeluarkan *Commintee of Spoonsoring Organization* (COSO), yaitu kerangka kerja pengendalian internal yang paling luas diterima di Amerika Aerikat, menguraikan lima komponen

pengendalian internal yang dirancang untuk mengimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai. Komponen pengendalian internal COSO, sama dengan yang ada dalam pasal 3 PP No. 60 tahun 2008 disebutkan bahwa SPIP meliputi hal-hal berikut :

#### 1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan unsur penting karena membentuk budaya dan perilaku manusia. Unsur manusia merupakan penggerak dan menjadi landasan dalam segala aktivitas. Pimpinan dan segenap pegawai di Inspektorat wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

#### 2) Penilaian Resiko

Penilaian risiko terkait dengan kemampuan mengidentifikasi serta mengukur besaran risiko dalam pencapaian tujuan Inspektorat. Di dalam lingkungan pengendalian yang baik, kemampuan untuk menilai risiko juga akan baik.

#### 3) Kegiatan/aktivitas pengendalian;

Kegiatan pengendalian terkait dengan kemampuan untuk memilih jenis pengendalian yang tepat yang dipengaruhi oleh ketepatan dalam menilai risiko. Inspektorat wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas

dan fungsi Inspektorat. Kegiatan pengendalian terdiri atas reviu kinerja; pembinaan sumber daya manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pengendalian fisik atas aset; penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

#### 4) Informasi dan komunikasi;

Unsur-unsur pengendalian yang lain akan mudah direalisasikan jika terdapat sistem informasi dan komunikasi yang baik. Sistem informasi dan komunikasi dikatakan baik jika setiap pegawai di Inspektorat mendapat pesan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan agar keseluruhan tujuan baik individu, kelompok, dan Inspektorat secara umum dapat dicapai.

#### 5) Pemantauan pengendalian intern.

Pemantauan adalah usaha berkelanjutan untuk menjamin bahwa setiap gerak dan langkah seluruh unsur di Inspektorat berjalan sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian intern di Inspektorat adalah dinamis, berubah sesuai tuntutan kondisi.

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Menurut Arens (2008 : 370) mengemukakan bahwa manajemen dalam merancang sistem pengendalian intern memiliki tiga tujuan umum :

1. Reliabilitas pelaporan keuangan
2. Efisiensi dan efektivitas operasi
3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

#### **Penelitian Relevan**

Penelitian mengenai sumber daya manusia ada di instansi pemerintah pernah

dilakukan. Penelitian Dinata (2004) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di Instansi Pemerintah Kota Palembang belum sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang masih belum memadai. Kapasitas sumber daya manusia yang masih minim ini memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Widinyaningrum (2010) yang berjudul Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda dengan variabel intervening Pengendalian Intern Akuntansi menunjukkan bahwa SDM dan Pemanfaatan TI berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemda melalui pengendalian intern akuntansi, Pemanfaatan TI berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemda, sedangkan SDM tidak berpengaruh dimana penelitian ini studi empirisnya di Pemda SUBOSUKA WONO SRATEN.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari, *et al.* (2008) pada Kota Palembang dan Ogan Hilir yang meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi (ketepatanwaktuan) pelaporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dari penelitian Harifan (2009) yang meneliti mengenai Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota

Padang, dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi (Keterpahaman) Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.

### **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan keterkaitan antara variable yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan kualitas sumber daya manusia yang memadai, adanya pengawasan terhadap keuangan daerah dan menerapkan sistem pengendalian intern pada pemerintah Kota Padang Panjang.

Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (andal). Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas dan kapasitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan.

Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan

yang handal. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang handal.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan keuangan pemerintah daerah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik.

Sistem pengendalian intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem pengendalian intern terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain informasi akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi. Bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi.

Hubungan antara kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan, dan pengendalian intern pemerintah terhadap nilai pelaporan keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:

### **Gambar 1**

#### **Hipotesis**

H1 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.  
H2 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah

H3 : Pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif (*causative*).

#### **Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, di Kota Padang Panjang.

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Padang Panjang. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Pemerintah Kota Padang Panjang jumlah Satuan Kerja yang terdapat berjumlah 27 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Inspektorat.

Penelitian ini menggunakan *total sampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 objek. Responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian dan staf akuntansi pada SKPD.

Maka, jumlah responden:

$$27 \text{ SKPD} \times 2 \text{ orang} = 54 \text{ Responden}$$

#### **Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek (*self-Report Data*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data adalah dengan penyebaran kuisioner.

#### **Variabel dan Pengukuran Variabel**

Variabel dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel dependent / terikat adalah nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.
2. Variabel independent/ bebas adalah Kualitas Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ), Pengawasan Keuangan Daerah ( $X_2$ ), dan Sistem Pengendalian Intern ( $X_3$ ).

Pengukuran variabel diukur dengan skala likert.

## Instrument Penelitian

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Sampel dan Responden Penelitian

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah dua puluh tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang Panjang. Setiap sampel memiliki dua responden. Dari dua puluh tujuh sampel tersebut, disebarkan sebanyak lima puluh empat kuesioner. Hingga batas akhir pengambilan, semua kuesioner diterima kembali dan semuanya mengisi dengan lengkap. Dengan demikian kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 54 kuesioner.

#### A. Uji Validitas Dan Reliabilitas

##### 1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan Corrected Item-Total Correlation. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka data dikatakan valid, dimana  $r_{tabel}$  untuk  $N = 54$ , adalah 0,2262. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $Y$  semuanya di atas  $r_{tabel}$ . Jika dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $Y$  adalah valid

#### Tabel 1

##### Nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil

Dari Tabel 12 di atas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen nilai informasi pelaporan keuangan diketahui nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil 0,553. Instrumen kualitas sumber daya manusia nilai terkecil 0,264, instrumen pengawasan keuangan daerah 0,507 dan untuk sistem pengendalian intern dengan nilai terkecil sebesar 0,580.

##### 2. Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin tinggi koefisien keandalan instrumen dalam penelitian : 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik (Sekaran, 2006:182). Berikut ini merupakan Tabel nilai cronbach's alpha masing-masing instrumen:

#### Tabel 2

##### Nilai Cronbach's Alpha

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan Cronbach's Alpha yang terdapat pada Tabel 13 di atas yaitu untuk instrumen nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah 0,871, untuk instrumen kualitas sumber daya manusia 0,726, untuk instrumen pengawasan keuangan daerah 0,832 dan untuk instrumen sistem pengendalian intern 0,868. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran di atas 0,7. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

#### Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis untuk pernyataan penelitian. Dalam melakukan analisis digunakan teknik regresi berganda. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS. Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari:

##### 1. Uji Normalitas Residual

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan  $> 0,05$  maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan  $< 0,05$  maka data tidak terdistribusi secara normal. Hasil perhitungan nilai

*Kolmogorov-Smirnov Test* untuk model yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 14 di bawah ini :

#### **Tabel 14**

##### **Uji Normalitas**

Dari Tabel 14 di atas terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,077 dengan signifikan 0,792. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas  $> 0,05$ .

## **2. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan  $VIF < 10$  maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil perhitungan nilai VIF untuk pengujian multikolinearitas antara sesama variabel bebas dapat dilihat pada Tabel 15 berikut:

#### **Tabel 15**

##### **Uji Multikolinearitas**

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam Tabel 15 di atas menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

## **3. Uji Heterokedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan

varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya  $\text{sig} > 0,05$  atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 16 berikut:

#### **Tabel 16**

##### **Uji Heterokedastisitas**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel Abres. Tingkat signifikansi  $> 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

## **Hasil Analisis Data**

### **1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengukuran koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 17 di bawah ini:

#### **Tabel 17**

Dari tampilan *output SPSS model summary* pada Tabel 17 di atas besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,742. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan dan pengendalian intern adalah sebesar 74,2%, sedangkan 25,8% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

## **2. Analisis Regresi**

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam

penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda. Model ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu kualitas sumber daya manusia (X1), pengawasan keuangan (X2), sistem pengendalian intern (X3) dan satu variabel terikat yaitu nilai informasi keuangan pemerintah (Y). Hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 18 berikut:

**Tabel 18**

**Koefisien Regresi Berganda**

Berdasarkan Tabel 18 di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 0.331 + 0,140X_1 + 0.608X_2 + 0.299X_3 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 0.331 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan dan pengendalian intern adalah nol maka nilai informasi keuangan daerah adalah sebesar konstanta.
- b. Koefisien kualitas sumber daya manusia sebesar 0,140 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kualitas sumber daya manusia satu satuan akan mengakibatkan nilai informasi keuangan daerah sebesar 0,140 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- c. Koefisien pengawasan keuangan sebesar 0.608 bahwa setiap peningkatan satu satuan pengawasan keuangan, maka akan mengakibatkan peningkatan nilai informasi keuangan daerah sebesar 0,608 dengan asumsi variabel lain konstan.
- d. Koefisien pengendalian intern sebesar 0.299 bahwa setiap peningkatan satu satuan pengendalian intern, maka akan mengakibatkan peningkatan nilai informasi keuangan daerah sebesar 0,299 dengan asumsi variabel lain konstan.

**3. Uji F (F-test)**

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Berdasarkan Tabel 19 nilai sig 0,000 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi variabel dependen, berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

**Tabel 19**

**Uji F Statistik**

Dari hasil pemrosesan data, dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  yaitu 38,447 dengan nilai signifikansi yaitu  $0,000 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent (Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern) secara bersama-sama (simultan) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (Nilai Informasi Pelaporan Akuntansi Keuangan Pemerintah).

**4. Uji Hipotesis (t-test)**

Uji t statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$ . Nilai  $t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 0,05$  dan derajat bebas (db) =  $n - k - 1 = 54 - 2 - 1 = 51$  adalah 2.00758.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 16, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini :

**1. Pengujian Hipotesis 1**

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Hipotesis diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai sig  $< 0,05$ . Nilai  $t_{tabel}$  pada

= 0,05 adalah 2.00758. Untuk variabel kualitas sumber daya manusia ( $X_1$ ) nilai  $t_{hitung}$  adalah 1.358 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , yaitu  $1.358 < 2.0129$  dan nilai signifikansi  $0,180 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini **ditolak**.

## 2. Pengujian hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Hipotesis diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai sig  $< 0,05$ . Nilai  $t_{tabel}$  pada = 0,05 adalah 2.0129. Untuk variabel pengawasan keuangan ( $X_2$ ) nilai  $t_{hitung}$  adalah 5.275 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $5.275 > 2.0129$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini **diterima**.

## 3. Pengujian hipotesis 3

Pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Hipotesis diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai sig  $< 0,05$ . Nilai  $t_{tabel}$  pada = 0,05 adalah 2.0129. Untuk variabel system pengendalian intern ( $X_3$ ) nilai  $t_{hitung}$  adalah 2.943 dan nilai sig adalah 0,005. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $2.943 > 2.0129$  dan nilai signifikansi  $0,005 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini **diterima**.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber daya manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Kualitas sumber daya manusia tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang Panjang, karena menurut peneliti, terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh besar terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Kota Padang Panjang.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) tentang Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak memberikan pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Ketidaksignifikanan ini disebabkan kondisi kualitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi/tata usaha keuangan yang belum mendukung. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa sumber daya manusia di subbagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu "*the one and only*" kepala subbagian akuntansi/tata usaha keuangan.

Namun secara praktik di lapangan kondisinya berbeda. Karena masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada yang

diberdayakan.Kelemahan yang ada diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

Bila dilihat dari hasil capaian responden, untuk pernyataan bahwa pengalaman dapat mengurangi kesalahan memperoleh nilai capaian yang terendah, yaitu 79%. Begitu juga dengan pernyataan bahwa pengalaman dituntut untuk menentukan spesifikasi pekerjaan yaitu 81%, hal ini menunjukkan bahwa banyak diantara responden yang kurang dan tidak setuju akan hal ini.Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai subbagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan hal ini terlihat dari data demografi responden.Uraian tugas dan fungsi subbagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Padahal fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang ilmu akuntansi.

Menurut peneliti, kemampuan seseorang dapat dipengaruhi dengan lamanya seseorang menggeluti bidangnya, karena waktu yang lama akan semakin membuat seseorang mahir dalam pekerjaannya dan memberi pengaruh yang baik pada organisasi atau instansi. Dalam penelitian ini, meskipun sumber daya manusia yang memiliki latar belakang akuntansi masih tergolong sedikit jumlahnya, namun opini auditor hanya menyatakan bidang asset yang masuk kategori wajar dengan pengecualisan, sementara secara keseluruhan menurut TCR nilai informasi pelaporan keuangan termasuk dalam kategori baik.

## **2. Pengaruh Pengawasan Keuangan dengan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pengawasan keuangan terhadap

nilai informasi pelaporan keuangan daerah.Hal ini berarti bahwa semakin baik pengawasan keuangan maka nilai informasi pelaporan keuangan pun semakin baik. Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan Armando (2013) tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah, yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan memberikan pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Pengawasan menurut peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang pedoman dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pasal 1 (satu) menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Yosa (2010) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.Bahwa, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan

atau

Bila dilihat dari hasil capaian responden, 90% responden menyatakan setuju bahwa penyusunan APBD sesuai dengan perencanaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan telah cukup baik. Menurut peneliti, pengawasan keuangan pemerintah daerah dapat menentukan kualitas laporan keuangan yang baik.

### **3. Sistem Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengendalian intern, maka nilai informasi pelaporan keuangan pun semakin baik.

Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan Armando (2013) tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah, yang menunjukkan bahwa pengendalian intern memberikan pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem pengendalian intern terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain

untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/ nilai informasi. Dari sistem informasi yang ada diharapkan mampu memproses serta menghasilkan data keuangan dan non keuangan menjadi suatu informasi yang dapat digunakan (bernilai) untuk pengambilan keputusan yang mana sistem akuntansi sudah menjadi satu kesatuan dari proses akuntansi, mulai dari akuntansi keuangan, audit dan saat ini sampai pada sistem pengendalian.

Sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain informasi akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi. Bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi.

Bila dilihat dari hasil capaian responden, 96% responden menyatakan bahwa setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Hal ini menunjukkan baiknya pengendalian intern yang ada saat ini. Menurut peneliti, untuk meningkatkan nilai pelaporan keuangan daerah atau pemerintah, perlu ditingkatkan lagi pengendalian intern dalam pemerintahan.

## **5. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah dan system pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap

nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan pengawasan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Dimana semakin baik pengawasan keuangan, nilai informasi pelaporan keuangan daerah pun akan semakin baik.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Dimana semakin baik pengendalian intern, nilai informasi pelaporan keuangan daerah pun akan semakin baik.

### **Keterbatasan**

Sekalipun penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Berikut beberapa keterbatasan yang kemungkinan mengganggu hasil penelitian ini :

1. Penelitian ini menggunakan metode survey tanpadilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan, sehingga kemungkinan mempengaruhi validitas hasil. Jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda jika data diperoleh dengan wawancara..
2. Penyebaran kuesioner pada beberapa SKPD masih memiliki kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner. Hal tersebut menyebabkan data yang diolah kurang optimal, untuk penelitian selanjutnya diharapkan responden yang dituju dapat melakukan pengisian kuesioner yang disebarkan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan beberapa saran berikut :

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pengawasan keuangan

daerah yang dilakukan oleh inspektorat dan system pengendalian interndi SKPD Kota Padang Panjang telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini akan berdampak pada nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah sebaiknya melakukan *upgrade* terhadap system akuntansi pelaporan keuangan daerah sehingga tidak ada hambatan dalam melakukan pencatatan akuntansi secara *online*. Dengan begitu maka akan mempermudah dalam penyajian laporan keuangan yang bermutu. Sedangkan pada kualitas sumber daya manusia belum memenuhi standar yang ada. Pemerintah daerah sebaiknya mulai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang akuntansi dan menempatkan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki. Mengadakan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaporan keuangan.

2. Penelitian ini masih terbatas pada Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variable penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang

## LAMPIRAN

**Tabel 12**  
**Nilai Corrected Item-Total Correlation**  
**terkecil**

Instrumen Variabel	Nilai Corrected Item-Total Correlation Terkecil
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan(Y)	0,553
Kualitas Sumber Daya Manusia (X <sub>1</sub> )	0,264
Pengawasan Keuangan Daerah (X <sub>2</sub> )	0,507
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(X <sub>3</sub> )	0,580

**Tabel 13**  
**Nilai Cronbach's Alpha**

Instrumen Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah (Y)	0,871
Kualitas Sumber Daya Manusia (X <sub>1</sub> )	0,726
Pengawasan Keuangan Daerah (X <sub>2</sub> )	0,832
Sistem Pengendalian Intern (X <sub>3</sub> )	0,868

**Tabel 14**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
N	54
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	
Mean	.0000000
Std. Deviation	1.751557
Most Extreme Differences	.39
Absolute Positive	.088
Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z	.650
Asymp. Sig. (2-tailed)	.792

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.

**Tabel 15**

**Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
Kualitas Sumber Daya Manusia	.557	1.795
Pengawasan Keuangan	.458	2.184
Pengendalian Intern	.474	2.111

a. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

**Tabel 16**

**Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-1.611	1.951	-.826	.413
Kualitas Sumber Daya Manusia	-.003	.061	-.055	.956
Pengawasan Keuangan	.109	.068	1.600	.116
Pengendalian Intern	-.017	.060	-.288	.775

**Tabel 17**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.870 <sup>a</sup>	.757	.742	1.80334

a. Predictors: (Constant), Kualitas Sumber Daya, Pengawasan Keuangan, Pengendalian Intern

**Tabel 18**  
**Koefisien Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.331	3.301		.100	.921
x1	.140	.103	.127	1.358	.180
x2	.608	.115	.544	5.275	.000
x3	.299	.102	.298	2.943	.005

a. Dependent Variable: y

**Tabel 19**  
**Uji F Statistik**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	505.324	3	168.441	51.796	.000 <sup>a</sup>
Residual	162.602	50	3.252		
Total	667.926	53			

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

b. Dependent Variable: y